

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK JALANAN DI KOTA CIREBON
(STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA CIREBON)**

Oleh :

Gumilang Rianto Prakoso

Mukarto siswoyo

Moh. Sutarjo

Abstract

An increasing number of street children in the city of Cirebon each year increased significantly with the number of unemployment, it is a fundamental duty of the City of Cirebon particular Social Services, Manpower Cirebon to provide guidance to street children. Economic constraints, families are lacking in meeting the needs of the child, so the child had asked to work on their own initiative or on the streets because of a very heavy burden on families. By looking at the shortage faced by street children, the Government should take the Cirebon City policy to provide guidance to the street children. The existence of street children policy development program conducted by the Department of Social Welfare, Manpower and Transmigration Cirebon City aims to foster the provision of street children in both the mental, spiritual and assistance for their needs so as to minimize their presence on the streets. However, the implementation of the development program of street children has not been in accordance with what was expected, given the constraints faced by the lack of facilities such as shelters for street children and the lack of funding coming from the center of the bottleneck to implement the program. For that reason, the author would like to see how the implementation of the development program of street children is already realized well or not. This study, the authors used qualitative analysis methods to uncover deeper through interviews, and observations made and see how it goes and implementation obstacles encountered. Based on research conducted by the author in the field it is seen that the implementation of the development programs of street children in Social Services, Manpower Cirebon is good enough. Only the lack of facilities and funds to carry out the training for street children.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Akibatnya, kekerasanlah yang mereka hadapi, pengeroyokan, perampasan barang, pelecehan seksual, dan lain – lain. Dengan kata lain bahwa dijalan rawan terhadap gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yakni merubah karakter (sikap) menjadi anak yang beringas, sangat agresif, suka baku hantam, sering usil, berani memprotes suka berbicara seenaknya yang disertai kata – kata kotor. Perilaku atau kebiasaan lain yang muncul pada anak – anak jalanan ialah berusaha mencari uang dengan cara apa saja sehingga sering berganti pekerjaan, (termasuk pekerjaan yang tidak terpuji misalnya : mencopet, menodong, merampas) rawan terhadap ,obat – obatan terlarang, minum – minuman keras dan zat – zat adiktif lainnya, serta mobilitasnya sangat tinggi (*nomaden*).

Salah satu masalah sosial di Kota Cirebon adalah anak jalanan. Cirebon di kenal sebagai salah satu daerah pemasok anak-anak jalanan di Jakarta, berdasarkan data terakhir yang didapat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon jumlah anak jalanan yang berada di Kota Cirebon adalah 380 anak jalanan.

Masalah – masalah yang diakibatkan anak jalanan di Kota Cirebon cukup memprihatinkan yang menimbulkan

keresahan di masyarakat, seperti halnya : memaksa pengemudi kendaraan bermotor memberikan sejumlah uang di lampu – lampu merah, sering melakukan tindakan kriminal di tempat – tempat ramai seperti (pasar dan terminal) dengan cara mencopet, mencuri, bahkan menodong, seringkali berkelahi antar sesama anak jalanan yang diakibatkan minum - minuman keras.

Namun pembinaan yang diterapkan selama ini dari berbagai konsep yang ditawarkan belum dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal ini telah diyakini sendiri oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon bahwa ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan diantaranya : Mekanisme perencanaan program yang masih terpusat, Kualitas implementasi program, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan alternatif program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak jalanan.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“Implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon)”.

A.2. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian di atas dapat di rumuskan masalah berupa *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut :

“Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan masih belum berjalan/terlaksana secara optimal”. Sebagaimana terlihat dari belum optimalnya:

- Mekanisme perencanaan program yang masih terpusat pada anak jalanan saja tetapi harus memperhatikan keluarga anak jalanan tersebut dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Kualitas implementasi program masih sangat kurang berjalan maksimal
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan

terhadap anak jalanan sangat tidak terjalin dengan erat antar berbagai pihak pelaksana jadi terlihat tidak sungguh – sungguh melakukannya.

A.3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon ?
3. Langkah – langkah apa yang diambil dalam mengatasi belum optimalnya implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon ?

A.4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian Implementasi Kebijakan Publik, dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon.
- b. Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Publik, terutama dalam kajian Implementasi kebijakan Publik.

A.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi

kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon.

3. Untuk mengetahui Langkah – langkah apa yang diambil dalam mengatasi belum optimalnya implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon.

A.6. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif, dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan gambaran, karena penyusun hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa.

A.7. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus menjelaskan jenis observasi dan wawancara yang dilakukannya, yaitu :

1. Observasi nonpartisipatif, yaitu jika peneliti hanya mengamati tanpa terlibat dalam proses kerja dari orang-orang di lokasi penelitian.
2. Wawancara terpimpin/terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara dan peneliti mengendalikan jalannya wawancara.
3. Wawancara tidak terpimpin/tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa mengacu pada pedoman wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan oleh peneliti secara mendalam (*indepth interview*) karena penelitian kualitatif mengandalkan datanya pada hasil wawancara.

A.8 Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
Yaitu proses pemilihan data yang telah diperoleh itu dikumpulkan,

dirinci secara sistematis dan menulis hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan gambaran dan analisis yang lebih tajam.

2. Display data

Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, table, gambar, grafik, dan sebagainya.

3. Verifikasi dan pemeriksaan kesimpulan

Yaitu usaha untuk memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema dan hubungan persamaan terhadap hal-hal yang penting.

A.9 Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis lakukan adalah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon yang beralamat di JL. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 01 Cirebon Telp. (0231) 202100, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat masalah belum optimalnya tentang pembinaan anak jalanan di Kota Cirebon.
2. Banyaknya sumber – sumber atau data penelitian yang mudah di dapat.
3. Letak yang strategis dan sangat terjangkau oleh penulis, selama dalam penyusunan skripsi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Wahab (2008:12) adalah pedoman untuk bertindak. Sementara *Friedrich* dalam (Wahab, 2008:13) mengatakan :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

B.2 Implementasi Kebijakan Publik

Istilah “Implementasi” sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan. Istilah ini selalu berkonotasi sebagai kegiatan atau *activity*, bahkan kedua istilah itu sering digunakan dalam satu konteks pengertian yaitu *implementation activity*.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat *Anderson* dalam *Subarsono* (2005:12) bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima langkah yaitu :

1. Formulasi masalah (*problem formulation*)
2. Formulasi kebijakan (*formulation*)
3. Penentuan kebijakan (*adoption*)
4. Implementasi (*implementation*)
5. Evaluasi (*evaluation*)

B.3 Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini telah banyak pakar yang mengemukakan mengenai hal tersebut.

B.4 Pengertian Program Pembinaan

Menurut *Charles O. Jones* Program adalah cara yang di syahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membawa seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai suatu program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf
Misalnya: untuk meleksanakan ataupun sebagai pelaku program\
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, Program kadang bisa juga diidentifikasi melalui anggaran

c. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

B.5. Anak Jalanan

Arti anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 Tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum dan melakukan kegiatan tidak jelas minimal dalam waktu 4 jam/hari dalam ukuran waktu 1 Bulan, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain-lain. Sedangkan menurut Johannes, pada seminar tentang pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menyebutkan bahwa anak jalanan adalah "Anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik untuk bekerja maupun tidak yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orang tua atau keluarga" (Huraerah,2006:80). Lebih lanjut, Sudijar mendefinisikan anak jalanan sebagai "Anak-anak usia 7-21 tahun yang bekerja di jalanan raya dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya, yang pada umumnya bekerja sebagai pengamen, penjual koran, penyemir sepatu, pedagang asongan dan pemulung". Dari batas pengertian tersebut Sudijar mengemukakan bahwa ciri-ciri anak jalanan yaitu:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 7-21 tahun, melakukan kegiatan tidak menentu, dan membahayakan dirinya sendiri di tempat-tempat umum (jalanan, pasar, tempat hiburan, terminal, dan stasiun)
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga yang tidak mampu (beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).

d. Melakukan aktifasi ekonomi. (Huraerah,2006:80)

B.6 Upaya Penanganan Anak Jalanan

Beberapa model pendekatan penanganan anak jalanan, antara lain sebagai berikut :

1. Street Based

Street Based merupakan penanganan di jalan atau di tempat – tempat anak jalanan berada, kemudian para *street educator* datang, kepada mereka berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami, dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak – anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, disamping itu anak jalanan memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi.

2. Centre Based

Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak – anak yang masuk dalam program ini di tampung, dan diberikan pelayanan dilembaga atau panti, seperti di malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen diberikan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian, dan pekerjaan. Dalam penanganan di lembaga atau di panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan, yakni seperti model penampungan yang bersifat sementara (*drop in centre*), dan tetap (*residential centre*). Untuk anak jalanan yang masih bolak balik ke jalan biasanya dimasukkan ke dalam *drop in centre*, sedangkan untuk anak jalanan yang sudah benar – benar sudah meninggalkan jalanan akan ditempatkan di *residential centre*.

3. Family and Community Based

Di dalam *community based*, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang

tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat *preventif*, yaitu mencegah anak – anak turun ke jalan. Keluarga diberikan penyuluhan pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak – anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak – anaknya. Hurin'in dalam hal ini sebagai lembaga masyarakat yang bergerak pada pemberian pendidikan agama dan pengisian waktu luang untuk anak – anak.

Tiga pendekatan tersebut merupakan pilihan yang bisa diterapkan kepada kondisi anak – anak, dimana tidak ada satu pendekatan yang lebih baik dari pendekatan lainnya, karena setiap tipe memiliki cirinya tersendiri, dan semua tergantung pada kebutuhan dan masalah anak jalannya. Berdasarkan pengertian ini pula maka keberhasilan penanganan tergantung pada pengaruhnya kepada anak. (Sudrajat, 1996 : 5)

B.7. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan pada peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, menjelaskan tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

A. Kedudukan

1. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

B. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asaa otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

C. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Cirebon (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon).

Program Pembinaan adalah cara yang di syahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membawa seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai suatu program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf Misalnya: untuk meleksanakan ataupun sebagai pelaku program\
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, Program kadang bisa juga diidentifikasi melalui anggaran
3. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Adapun Penyelenggaraan program pembinaan anak jalanan mengacu pada prinsip-prinsip :

1. Prinsip Pencegahan
2. Prinsip Penyembuhan
3. Prinsip Pengembangan

Berdasarkan Bina Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan melalui 5

pembinaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjangkauan

Pada tahap penjangkauan para pembina terjun kejalan yang berada di kantung sasaran atau pusat kegiatan anak jalanan seperti terminal, pasar, perempatan jalan untuk mengajak anak jalanan untuk mengikuti program pembinaan anak jalanan yang ada. Proses ini dilakukan secara intensif selama tiga bulan pertama dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan.

2. *Problem Assesment*

Pada tahap ini, anak jalanan yang sudah mengetahui tentang program pembinaan diberikan motivasi untuk datang pada kegiatan pembinaan dan diberikan kesempatan bersosialisasi.

3. Persiapan Pemberdayaan

Pada tahap persiapan pemberdayaan, yaitu diisi dengan resosialisasi dimana anak dikenalkan dengan peraturan yang ada dalam program pembinaan. Pembina memberikan pengarah tentang manfaat mengikuti program pembinaan sebagai tempat untuk belajar, mendapat bimbingan, mendapat ketrampilan dan konsultasi.

4. Pemberdayaan

Pada tahap pemberdayaan anak mulai menerima pemberdayaan sesuai dengan keinginan anak. Para pembina selalu memonitoring kemajuan anak dan membantu kesulitan yang tengah dihadapi. Anak diajarkan untuk bersikap bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan diberdayakan untuk bersikap produktif melalui pemberian beasiswa dan modal usaha.

5. Pengakhiran (Terminasi)

Pada Tahap Pengakhiran berarti anak selesai menerima pelayanan pembinaan dan setelah menerima pembinaan anak maka anak di harapkan bersikap dewasa, mandiri, ahli kerja dan bagi anak yang masih memiliki keluarga kembali kepada keluarganya, jika anak yang tidak mempunyai keluarga maka akan di salurkan ke panti – panti.

Banyak faktor yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan

terhadap Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan itu.

C.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Kasus Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon).

Dilihat dalam tataran teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan (termasuk implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Indonesia) banyak dipengaruhi berbagai faktor. Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Nugroho (2004:167) dan Indiahono (2009:39) ada empat faktor atau variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana
3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
4. Kecenderungan aparat pelaksana

C.3. Langkah – langkah Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon)

Langkah – langkah yang diambil dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon) adalah sebagai berikut :

1. Selalu terjalin komunikasi yang baik antar instansi terkait pembinaan anak jalanan.
2. Pengorganisasian berjalan baik antar instansi yang selalu mengadakan rapat rutin terkait pembinaan anak jalanan.
3. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pembina anak jalanan di lapangan.
4. Dengan adanya UPTD RPSA (Rumah Perlindungan Anak Sementara) yang

baru saja ada berharap anak jalanan mendapat tempat yang layak pada pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.

5. Meminta agar anggaran dari pusat terhadap program pembinaan anak jalanan lebih di tambah lagi dan disesuaikan dengan jumlah anak jalanan yang ada.
6. Tidak terfokus kepada anak jalanan saja tetapi memberikan sosialisasi terhadap keluarga atau orang tua anak jalanan dan diberikan santunan rutin yang tadinya 1 tahun sekali menjadi 1 bulan sekali dan terhadap lingkungan sekitar diberi sosialisasi agar tidak mendukung seorang anak kejalanan.
7. Untuk melengkapi permasalahan sarana dan prasarana yang ada di butuhkan materiil yang lebih dan diperlengkap lagi, agar program pembinaan anak jalanan bisa berjalan dengan maksimal dan membuat anak jalanan itu sendiri menjadi nyaman dan Untuk pengawasan lebih ditingkatkan lagi atau pimpinan terkait melakukan pengawasan langsung agar mengetahui langsung kondisi tersebut dan apa yang harus dikoreksi.
8. Untuk karakteristik agen pelaksana mungkin sudah lebih baik tetapi akan lebih baik lagi jika pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk ikut turun langsung ke pembinaan anak jalanan tidak hanya menerima laporan saja.
9. Untuk Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik itu sendiri hendaknya Dukungan APBD di berikan sesuai banyak anak jalanan yang mengikuti program pembinaan anak jalanan dan di perbesar lagi nominalnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

D.1. Kesimpulan

1. Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Cirebon khususnya di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

belum berhasil secara optimal hal ini dapat dilihat dari :

- a. Aktivitas Implementasi Komunikasi antar Organisasi :
 - c. Karakteristik Agen Pelaksana :
 - d. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik :
 - e. Kecenderungan Aparat Pelaksana :
2. Langkah – langkah yang diambil dalam mengatasi belum optimalnya program pembinaan anak jalanan kota Cirebon di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi keempat faktor dari Implementasi dan Kinerja Kebijakan itu masih terdapat hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Selalu terjalin komunikasi yang baik antar instansi terkait pembinaan anak jalanan.
 2. Pengorganisasian berjalan baik antar instansi yang selalu mengadakan rapat rutin terkait pembinaan anak jalanan.
 3. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pembina anak jalanan di lapangan.
 4. Dengan adanya UPTD RPSA (Rumah Perlindungan Anak Sementara) yang baru saja ada berharap anak jalanan mendapat tempat yang layak pada pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
 5. Meminta agar anggaran dari pusat terhadap program pembinaan anak jalanan lebih di tambah lagi dan disesuaikan dengan jumlah anak jalanan yang ada.
 6. Tidak terfokus kepada anak jalanan saja tetapi memberikan sosialisasi terhadap keluarga atau orang tua anak jalanan dan diberikan santunan rutin yang tadinya 1 tahun sekali menjadi 1 bulan sekali dan terhadap lingkungan sekitar diberi sosialisasi agar tidak mendukung seorang anak kejalanan.
 7. Untuk melengkapi permasalahan sarana dan prasarana yang ada di

butuhkan materiil yang lebih dan diperlengkap lagi, agar program pembinaan anak jalanan bisa berjalan dengan maksimal dan membuat anak jalanan itu sendiri menjadi nyaman dan Untuk pengawasan lebih ditingkatkan lagi atau pimpinan terkait melakukan pengawasan langsung agar mengetahui langsung kondisi tersebut dan apa yang harus dikoreksi.

8. Untuk karakteristik agen pelaksana mungkin sudah lebih baik tetapi akan lebih baik lagi jika pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk ikut turun langsung ke pembinaan anak jalanan tidak hanya menerima laporan saja.
9. Untuk Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik itu sendiri hendaknya Dukungan APBD di berikan sesuai banyak anak jalanan yang mengikuti program pembinaan anak jalanan dan di perbesar lagi nominalnya.

5.2. Saran

Dalam menangani persoalan anak jalanan diperlukan :

1. Undang – Undang / PERDA yang jelas ditinjau dari berbagai latar belakang yang melingkupi anak jalanan sejalan dengan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak jalanan artinya adanya keberpihakan terhadap nasib anak bangsa sebagai generasi dimasa mendatang. Jangan membuat kebijakan hanya sekedar melihat kepentingan sepihak. Contoh : demi keberhasilan lingkungan diadakan penggarukkan dan penyitaan barang (alat musik) tanpa solusi yang jelas.
2. Waspada adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang seperti contoh diatas jelas tidak sesuai dengan UU/Perda yang berlaku.
3. Penanganan yang serius, terfokus dan berkelanjutan tidak sekedar

mengacu pada proyek (anggaran) baik dari kwantitas sasaran dan kualitas layanan maupun berkenaan dengan jangka waktu.

4. Perlunya upaya mencari solusi tentang keberadaan anak jalanan adalah dengan membatasi jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi dengan berbagai kriteria yang ditaati, melakukan kembali program KB (Keluarga Berencana) sebagai salah satu solusi meringankan beban tanggungan keluarga dan upaya – upaya yang lain.
5. Diharapkan selalu ada evaluasi dan analisa terhadap program penanganan anak jalanan dalam forum kajian penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu UU / PERDA / Program bagi pengentasan anak jalanan. Sudah barang tentu bahwa hal ini diperlukan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) / LSK (Layanan Sertifikasi Kompetensi) yang menangani pembinaan anak jalanan agar segera didapatkan hasil pengentasan yang maksimal atau sesuai dengan visi dan misi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaterly Press
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap, Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Bandung: Nuansa
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta : Gaya Media
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sudrajat, Tata. 1996. *Anak Jalanan : dari masalah sehari-hari sampai Kebijakan Dehumanisasi Anak Marjinal berbagai pengalaman pemberdayaan*. Bandung : Yayasan Akatiga Analisis
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta
- Suyanto, Bagong, dkk. 1999. *Anak Jalanan di Jawa Timur (Masalah dan Upaya Penangannya)*. Surabaya : Airlangga University Press
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2004. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Westra, Pariata, dkk. (ed).1999. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi*
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta : PT. Elex media komputindo
- Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

